

# Pendayagunaan Program Kesenjangan, Pendidikan Nonformal: Kasus Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008/2009

Ida Kintamani Dewi Hermawan  
e-mail: idakintamani@yahoo.com

**Abstrak:** Tujuan pendayagunaan program kesetaraan, pendidikan nonformal di Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk memahami keadaan program kesetaraan di provinsi tersebut yang diukur dengan indikator pemerataan dan mutu pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sesuai dengan standar ideal program kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat dikatakan masih belum merata karena mencapai 36,78%, belum bermutu dengan nilai capaian sebesar 54,70%, dan keberhasilan program kesetaraan masih rendah dengan nilai capaian sebesar 45,74%. Bila digunakan standar nasional maka kondisi cukup baik. Pemerataan pencapaiannya sebesar 89,74%, mutu sebesar 85,98%, dan keberhasilan program kesetaraan telah mencapai 87,46%. Disimpulkan bahwa berdasarkan program Kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat diarahkan ke standar ideal maka masih jauh dari harapan karena pencapaiannya kurang dari 50%. Namun, bila berdasarkan standar nasional sudah cukup baik karena hanya perlu 13,54% untuk menuntaskan. Disarankan agar pemerintah provinsi yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan melakukan prioritas dalam pembangunan program kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu baik pemerataan maupun mutu pendidikan program kesetaraan harus dibenahi sehingga mendukung program pendidikan dasar dan menengah.

**Kata kunci:** *pendayagunaan, pendidikan nonformal, program kesetaraan, pemerataan pendidikan, dan mutu pendidikan*

**Abstract:** The aim of utilization of equality program, non-formal education in West Sulawesi Province is to understand the existing condition of equality program in West Sulawesi Province that is measured using equity and access to education and quality indicators. The analysis using ideal standard shows that equity program in West Sulawesi Province is still not yet equity with the value of 36.78%, not yet qualify with the value of 54.79% so that the successfulness of equity program is still low with the value of 45.74%. When comparing to national standard, equity is 89.74%, quality is 85.98%, and successful of equity program is 87.46%. So, it is summarized that if equality program in West Sulawesi is compared to ideal standard, it is far away achieve due to less than 50% but if is used to national standard, it is good enough because it is only 13.54% to completeness. With this condition, it is suggested that government give a priority to build equality program in West Sulawesi both in equity and quality so that it can support basic and secondary program.

**Key words:** *utilization, non-formal education, equality program, equity of education, quality of education, and program performance*

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Program pendidikan nonformal diarahkan untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, atau buta aksara, putus sekolah, dan kelompok masyarakat lainnya yang kebutuhannya tidak dapat dipenuhi melalui jalur pendidikan formal. Layanan pendidikan ditujukan kepada semua warga masyarakat baik laki-laki maupun

perempuan agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan vokasional. Dengan demikian, pendidikan nonformal sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 86).

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal

yang ditunjukkan melalui Surat Edaran Mendiknas Nomor 107/MPN/MS/2006 tentang Eligibilitas Program Kesetaraan. Hasil ini dilakukan setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26, Ayat 6). (<http://bukhari.or.id>).

Berdasarkan pada eligibilitas program kesetaraan maka perlu diketahui bagaimana data dan informasi tentang program kesetaraan yang dapat menunjang pendidikan formal. Pada saat ini data tentang program kesetaraan belum pernah dilakukan analisis baik dari segi banyaknya program yang tersedia di setiap provinsi, kabupaten/kota atau Pusat maupun jumlah peserta didiknya. Data tentang program kesetaraan tersebut masih terpisah-pisah dan tidak ada kaitan satu dengan lainnya sehingga untuk pencarian data tentang program kesetaraan menjadi makin rumit. Kondisi tersebut makin rumit ketika akan dilihat perkembangan data program kesetaraan. Pusat Statistik Pendidikan (PSP) memiliki tugas dan fungsi dalam pendataan pendidikan termasuk pendidikan nonformal juga merasa kesulitan mendapatkan data yang akurat khususnya untuk program kesetaraan. Tugas dan fungsi PSP selain sebagai pusat produksi data pendidikan yang menghasilkan statistik pendidikan maka PSP juga melakukan pendayagunaan/pelayanan data pendidikan. Dalam melaksanakan pendayagunaan data, PSP perlu mengumpulkan data pendidikan nonformal termasuk program kesetaraan. Pada kenyataannya, mengumpulkan data pendidikan nonformal tidaklah semudah mengumpulkan data pendidikan formal karena pendidikan formal datanya tersedia di setiap sekolah sedangkan pendidikan nonformal datanya terserak di mana-mana karena lokasi pelaksanaan kegiatan belajar dapat berpindah-pindah tempat. Pada pendidikan formal ketika anak akan bersekolah mereka mencari ke sekolah. Sebaliknya, pada pendidikan nonformal peserta didik harus dicari di masyarakat. Kesulitan mencari peserta didik ini menyebabkan data pendidikan nonformal menjadi tidak akurat.

Agar dapat memahami pendidikan nonformal khususnya program kesetaraan maka perlu

dilakukan pendayagunaan data program kesetaraan untuk pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pada pendidikan nonformal khusus program kesetaraan. Sebagai contoh pendayagunaan data program kesetaraan maka hanya dipilih salah satu provinsi sehingga dapat dijadikan model untuk pendayagunaan program kesetaraan provinsi lainnya. Model ini juga dapat digunakan untuk pendayagunaan program kesetaraan untuk tiap kabupaten/kota dan ketersediaan data yang lengkap.

Berdasarkan uraian tentang latar belakang dirumuskan permasalahan adanya 5 permasalahan, yaitu 1) Bagaimana kondisi pendidikan nonformal di Provinsi Sulawesi Barat?, 2) Bagaimana kondisi program kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat, 3) Bagaimana pendayagunaan indikator pemerataan program kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat, 4) Bagaimana pendayagunaan indikator mutu program kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat, dan 5) Bagaimana keberhasilan program kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat?

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan pendayagunaan ini adalah untuk mengetahui data dan informasi mengenai lima variabel, yaitu 1) kondisi pendidikan nonformal di Provinsi Sulawesi Barat, 2) kondisi program kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat, 3) hasil indikator pemerataan program kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat, 4) hasil indikator mutu program kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat, dan 5) keberhasilan program kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat.

## **Kajian Literatur**

Berikut ini disajikan tentang apa yang dimaksud dengan 1) pendayagunaan data, 2) pendidikan nonformal, 3) program kesetaraan, 4) indikator pemerataan dan perluasan akses pendidikan program kesetaraan, 5) indikator mutu pendidikan program kesetaraan, dan 6) keberhasilan program kesetaraan.

## **Pendayagunaan Data**

Pendayagunaan data merupakan suatu cara untuk melakukan eksplorasi terhadap hasil produksi data berdasarkan pada perkembangan

pembangunan pendidikan, kebutuhan pimpinan, atau permintaan data. Pendayagunaan data adalah kegiatan yang bersifat aktif dalam melakukan eksplorasi data. Untuk melakukan eksplorasi dituntut adanya kreativitas dan kepekaan yang tinggi dari para personilnya sehingga dapat selalu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan maupun masyarakat berkenaan dengan pengenalan arah dan permasalahan dunia pendidikan. Untuk dapat mendayagunakan data yang ada diperlukan kemampuan dalam melakukan analisis dan sintesis data maupun interpretasi data. Kemampuan tersebut harus dimiliki oleh semua personil di lingkungan unit kerja yang menangani pendataan. Analisis adalah kemampuan dalam mencari keterkaitan antarvariabel data pendidikan sehingga dapat tercipta informasi-informasi baru yang relevan dengan tujuan pembinaan, penyelenggaraan, dan program pembangunan pendidikan. Sintesis data adalah kemampuan dalam mencari keterkaitan antara variabel data pendidikan dengan data nonpendidikan. (Ida Kintamani, 2007 dan Ida Kintamani, 2009b).

### **Pendidikan Nonformal**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian Kelima, Pasal 26 dinyatakan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal yang dikembangkan meliputi pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, peningkatan pembinaan kursus dan pelatihan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 20).

Keberadaan pendidikan nonformal melengkapi keberadaan pendidikan formal untuk

mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan nonformal bersifat luwes bila dibandingkan dengan pendidikan formal. Keluwesan pendidikan nonformal berkenaan dengan waktu belajar, usia peserta didik, isi pelajaran, cara penyelenggaraan pengajaran, dan cara penilaian hasil belajar. Pendidikan nonformal mampu memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dengan sasaran yang sangat besar dan multisekmen, dari usia dini sampai usia lanjut, dari putus sekolah sampai yang berkeinginan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis, pendidikan nonformal mampu menerapkan semboyan "melayani yang tak terlayani". (Pusat Statistik Pendidikan, 2008c).

### **Program Kesetaraan**

Pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan nonformal dengan standar kompetensi lulusan sama dengan pendidikan formal. Namun, isi, konteks, metodologi, dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut berbeda karena perbedaan dalam proses pembelajaran. Sistem pembelajaran pendidikan kesetaraan dirancang agar memiliki kekuatan tersendiri, untuk mengembangkan kecakapan komprehensif dan kompetitif yang berguna dalam peningkatan kemampuan belajar sepanjang hayat.

Pendidikan kesetaraan terdiri dari tiga program, yaitu 2) Paket A setara SD, 2) Paket B setara SMP, dan 3) Paket C setara SMA. Program Paket A dan B dirancang untuk menunjang suksesnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun (Wajar Dikdas) dengan prioritas anak usia Wajar Dikdas (7-15 tahun) yang karena berbagai hal tidak bisa mengikuti pendidikan formal. Meskipun demikian, Paket A dan Paket B juga memberi kesempatan bagi orang dewasa yang belum memiliki pendidikan setara Pendidikan Dasar 9 tahun. Program Paket C dirancang untuk mengembangkan pendidikan menengah dan memberikan pelayanan pendidikan bagi warga masyarakat yang belum memiliki pendidikan setara SMA. Kurikulum disusun berdasarkan kurikulum SMA jurusan IPS. Bahan belajar disusun dalam bentuk modul sehingga warga belajar

dapat belajar mandiri. (Pusat Statistik Pendidikan, 2008c).

Pengembangan pendidikan kesetaraan dilakukan melalui pembukaan kelompok-kelompok belajar pada sasaran yang terfokus, yaitu pada daerah yang memiliki APK sangat rendah. Target Paket A adalah siswa putus SD kelas 4 sampai kelas 6. Target Paket B adalah lulusan SD yang tidak melanjutkan dan siswa putus SMP. Target Paket C adalah lulusan SMP yang tidak melanjutkan dan siswa putus SMA.

### Indikator Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Program Kesetaraan

Berdasarkan Rencana Strategi Depdiknas tahun 2005-2009 ditetapkan adanya tiga pilar kebijakan pembangunan pendidikan, yaitu 1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, dan 3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Indikator pendidikan yang ada dalam program pendidikan nonformal juga diarahkan pada tiga pilar kebijakan pembangunan pendidikan. (Departemen Pendidikan nasional, 2005).

Perencanaan pembangunan pendidikan nonformal memerlukan data dan informasi yang terintegrasi, lengkap, dan mutakhir dari berbagai sektor. Integrasi data dan informasi yang komprehensif bisa memungkinkan tercapainya perumusan kebijakan yang tepat dan bermanfaat. Oleh karena itu, diperlukan penjarangan data dan informasi yang mampu menggambarkan keadaan umum daerah beserta data statistik pendidikan nonformal.

Pilar kebijakan pertama, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan nonformal menggunakan beberapa indikator kunci. Indikator kunci utama di tingkat nasional untuk mengukur akses pendidikan adalah APK. APK digunakan untuk program PAUD, program kesetaraan, tingkat SMP, SM, dan PT. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). APK adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase (Ida Kintamani, 2007). Dengan demikian, APK program kesetaraan adalah perbandingan antara

jumlah peserta didik program kesetaraan dengan jumlah penduduk kelompok usia yang sesuai dan dikalikan dengan angka 100. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{APK Kesetaraan} = \frac{\text{Jumlah Peserta Didik}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Sekolah}} \times 100$$

Catatan : Program Paket A penduduk 7-12 tahun, Paket B penduduk 13-15 tahun, Paket C penduduk 16-18 tahun, dan kesetaraan penduduk 7-18 tahun.

APK kesetaraan digunakan untuk melihat berapa besar partisipasi program kesetaraan yang bersekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Makin tinggi nilai APK berarti makin banyak partisipasi program kesetaraan terhadap pencapaian APK. Sebaliknya, makin kecil nilai APK berarti makin sedikit partisipasi program kesetaraan terhadap pencapaian APK.

Selain indikator kunci yang digunakan di tingkat nasional, terdapat indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur akses pendidikan nonformal program kesetaraan, yaitu 1) rasio peserta didik per kelompok belajar (R-PD/KB) dan 2) rasio peserta didik per pendidik (R-PD/P). Untuk mengukur pemerataan pendidikan nonformal program kesetaraan maka digunakan tiga indikator lainnya, yaitu 1) persentase peserta didik menurut jenis kelamin (%PDJK), 2) perbedaan gender (PG), dan 3) rasio gender (RG). (Pusat Statistik Pendidikan, 2008b).

R-PD/KB dihitung dari pembagian antara peserta didik program kesetaraan dibagi dengan kelompok belajar program kesetaraan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{R-PD/KB} = \frac{\text{Jumlah Peserta Didik}}{\text{Jumlah Kelompok Belajar}}$$

Catatan : Program Paket A, Paket B, Paket C, dan kesetaraan

R-PD/KB untuk melihat kepadatan di setiap kelompok belajar. Makin besar nilai rasio berarti makin padat kelompok belajar. Sebaliknya, makin kecil rasio berarti makin jarang kelompok belajar.

R-PD/P dihitung dari pembagian antara peserta didik program kesetaraan dengan pendidik program kesetaraan. Rumus yang

digunakan adalah:

$$R-PD/P = \frac{\text{Jumlah Peserta Didik}}{\text{Jumlah Pendidik}}$$

Catatan : Program Paket A, Paket B, Paket C, dan kesetaraan

R-PD/P untuk melihat seberapa banyak peserta didik dapat dilayani oleh seorang pendidik. Makin kecil nilai rasio berarti pelayanan pendidik terhadap peserta didik makin kecil atau intensif. Sebaliknya, makin besar rasio berarti pelayanan pendidik makin besar atau kurang intensif.

%PDJK dihitung dari jumlah peserta didik laki-laki suatu program dibagi dengan jumlah peserta didik seluruhnya program yang sesuai atau peserta didik perempuan suatu program dibagi dengan jumlah peserta didik seluruhnya program yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus yang digunakan ada dua, yaitu:

- 1) %PDJKI adalah persentase peserta didik laki-laki

$$\%PDJKI = \frac{\text{Jumlah Peserta Didik Laki2}}{\text{Jumlah Peserta Didik seluruhnya}} \times 100$$

- 2) %PDJKp adalah persentase peserta didik perempuan

$$\%PDJKp = \frac{\text{Jumlah Peserta Didik Perempuan}}{\text{Jumlah Peserta Didik seluruhnya}} \times 100$$

Catatan : Program Paket A, Paket B, Paket C, dan kesetaraan

%PDJK untuk melihat berapa besar porsi laki-laki atau perempuan terhadap jumlah peserta didik yang bersekolah di program kesetaraan. Makin tinggi porsi laki-laki berarti makin besar peserta didik laki-laki. Sebaliknya, makin rendah porsi laki-laki berarti makin kecil peserta didik laki-laki.

PG dihitung dari persentase peserta didik laki-laki suatu program dikurangi peserta didik perempuan program yang sesuai. Rumus yang digunakan adalah:

$$PG = \%PD\text{Laki2} - \%PD\text{Perempuan}$$

Catatan : Program Paket A, Paket B, Paket C, dan kesetaraan

PG kesetaraan digunakan untuk melihat perbedaan partisipasi antara perempuan dan laki-laki sebagai peserta didik. Nilai 0 berarti tidak ada perbedaan gender sedangkan persentase positif berarti terjadi perbedaan gender namun laki-laki lebih besar daripada perempuan sedangkan nilai negatif berarti terjadi perbedaan gender namun perempuan lebih besar daripada laki-laki.

RG dihitung dari persentase peserta didik perempuan suatu program dibagi dengan persentase peserta didik laki-laki program yang sesuai. Rumus yang digunakan adalah:

$$RG = \frac{\% PD \text{ Perempuan}}{\% PD \text{ Laki2}}$$

Catatan : Program Paket A, Paket B, Paket C, dan kesetaraan

RG digunakan untuk melihat apakah ada keseimbangan antara peserta didik antara perempuan dan laki-laki. Nilai 1 berarti terjadi keseimbangan gender sedangkan nilai kurang dari 1 berarti belum terjadi keseimbangan gender namun perempuan lebih kecil daripada laki-laki sedangkan nilai lebih dari 1 berarti belum terjadi keseimbangan gender namun laki-laki lebih kecil daripada perempuan.

Untuk menentukan bahwa program kesetaraan tersebut sudah merata maka digunakan tiga indikator akses, yaitu APK, R-PD/KB, dan R-PD/P. Selain itu, pengaruh masing-masing indikator berbeda sehingga setiap indikator diberikan bobot berbeda. APK diberi bobot tertinggi yaitu 0,6, R-PD/KB dan R-PD/P diberi bobot masing-masing 0,2 sehingga nilai bobot tiga indikator adalah 1. R-PD/KB dan R-PD/P dikonversi menjadi persentase dengan cara nilai R-PD/KB dibagi dengan nilai R-PD/KB nasional demikian juga R-PD/P dibagi dengan nilai R-PD/P nasional (Pusat Statistik Pendidikan, 2008a). Sebaliknya, indikator pemerataan hanya untuk mengetahui kesenjangan dan ketidakseimbangan gender.

### Indikator Mutu Pendidikan Program Kesetaraan

Sejalan dengan program pemerataan dan perluasan akses pendidikan maka peningkatan mutu untuk semua jenjang pendidikan melalui

pendidikan formal maupun nonformal juga dilaksanakan. Dianggap bermutu jika memenuhi suatu standar tertentu. Oleh karena itu, peningkatan mutu diarahkan menuju suatu standar tertentu. Peningkatan mutu dapat dilaksanakan pada masukan, keluaran, proses, guru, sarana/prasarana dan biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19, Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjelaskan komponen yang digunakan sebagai standar dalam pengelolaan pendidikan nasional dan menjadi alat ukur akan jaminan mutu pendidikan yang dijalankan oleh program dan/atau satuan penyelenggara pendidikan di tingkat pusat maupun daerah. Standar Nasional Pendidikan (SNP) menurut Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 Pasal 35 menyatakan, bahwa SNP terdiri atas 8 pokok standar, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara terencana dan berkala. Untuk menilai kelayakan dan mutu pendidikan oleh program PNF, diperlukan instrumen penilaian yang mengukur pemenuhan SNP yang digunakan untuk proses akreditasi suatu program PNF.

Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, Pasal 60 menjelaskan, bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2003). Akreditasi terhadap program PNF dilakukan oleh pemerintah dan/atau satuan program mandiri yang berwenang sebagai penjamin akuntabilitas publik dan dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Akreditasi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penilaian dengan membandingkan apa yang ada dan apa yang dituntut dalam standar yang telah ditetapkan dalam upaya menjaga dan menjamin mutu. Dengan demikian, untuk mengukur tingkat mutu minimal penyelenggaraan program kesetaraan pendidikan nonformal telah dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF) melalui proses akreditasi

pada program kesetaraan. Oleh karena itu, BAN PNF dihadapkan pada permasalahan program studi yang harus diakreditasi sedangkan pada saat yang sama BAN PNF harus menjaga kredibilitas proses dan hasil akreditasi. (<http://web.banpnf.or.id/>).

Untuk mengukur peningkatan mutu, kajian ini menggunakan beberapa indikator kunci. Indikator kunci utama di tingkat nasional adalah persentase pendidik layak mengajar (%PL) (Departemen Pendidikan Nasional, 2006). %PL didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah pendidik yang layak mengajar dikaitkan dengan ijazah yang dimiliki (S1 atau Diploma 4 dan lebih tinggi) suatu program dengan jumlah pendidik seluruhnya pada program yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Namun, pendidik PNF yang layak mengajar sampai saat ini belum ada ketentuannya. Namun, dalam peningkatan mutu pendidik PNF disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu untuk semua jenjang program kesetaraan adalah lulusan S1/Diploma 4 dan lebih tinggi. Rumus yang digunakan adalah:

$\%PL = \frac{\text{Jumlah Pendidik layak mengajar}}{\text{Jumlah Pendidik seluruhnya}} \times 100$	
---	--

Catatan : Program Paket A, Paket B, Paket C, dan kesetaraan

Idealnya, %PL adalah 100% berarti semua pendidik berusia layak mengajar atau berijazah S1/Diploma 4 dan lebih tinggi.

Selain indikator kunci yang digunakan di tingkat nasional maka terdapat indikator lain untuk mengukur mutu pendidikan dilihat dari sumber daya manusia, peserta didik, dan biaya yang dikeluarkan. Untuk sumber daya manusia ada tiga, yaitu 1) persentase pendidik dengan pekerjaan guru (%PPG), 2) persentase pendidik yang sudah dilatih (%PSP), dan 3) persentase tingkat pendidikan penyelenggara (%PS1). Untuk peserta didik ada dua, yaitu 1) persentase peserta ujian (%PU) dan 2) persentase lulusan (%L), sedangkan untuk biaya dihitung dari satuan biaya (SB). (Pusat Statistik Pendidikan, 2008a).

Upaya peningkatan mutu dan relevansi program kesetaraan akan dilakukan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara terpadu. Penilaian mutu mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan pelaksanaan akreditasi dilakukan secara independen oleh BAN PNF.

%PPG dihitung dari jumlah pendidik suatu program yang bekerja sebagai guru dibagi dengan jumlah pendidik seluruhnya program yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus yang digunakan adalah:

$$\%PPG = \frac{\text{Jumlah Pendidik dr Guru}}{\text{Jumlah Pendidik seluruhnya}} \times 100$$

Catatan : Program Paket A, Paket B, Paket C, dan kesetaraan

Idealnya, %PPG adalah 100% berarti semua pendidik berasal dari guru yang telah memahami bagaimana cara mengajar sehingga dapat meningkatkan mutu program kesetaraan.

%PSP dihitung dari jumlah pendidik yang sudah dilatih tentang suatu program dibagi dengan jumlah pendidik seluruhnya program yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus yang digunakan adalah:

$$\%PSP = \frac{\text{Jumlah Pendidik sdh Dilatih}}{\text{Jumlah Pendidik seluruhnya}} \times 100$$

Catatan : Program Paket A, Paket B, Paket C, dan kesetaraan

Idealnya, %PSP adalah 100% berarti semua pendidik sudah mendapatkan pelatihan program kesetaraan yang sesuai sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan.

%PS1 dihitung dari jumlah penyelenggara yang berpendidikan S1 ke atas suatu program dibagi dengan jumlah penyelenggara seluruhnya program yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus yang digunakan adalah:

$$\%PS1 = \frac{\text{Jumlah Penyelenggara S1 ke atas}}{\text{Jumlah Penyelenggara seluruhnya}} \times 100$$

Catatan : Program Paket A, Paket B, Paket C, dan kesetaraan

Idealnya, %PS1 adalah 100% berarti semua penyelenggara sudah memiliki ijazah yang ditentukan sehingga dapat meningkatkan mutu program kesetaraan.

%PU dihitung dari jumlah peserta ujian suatu program dibagi dengan jumlah peserta didik program yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus yang digunakan adalah:

$$\%PU = \frac{\text{Jumlah Peserta Ujian}}{\text{Jumlah Peserta Didik}} \times 100$$

Catatan : Program Paket A, Paket B, Paket C, dan kesetaraan

%PU makin tinggi makin baik karena makin banyak peserta didik yang mengikuti ujian. Hal ini menunjukkan pentingnya ujian bagi peserta didik untuk meningkatkan mutu peserta didik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, 95% peserta didik yang mengikuti ujian akhir Paket A dapat lulus ujian sedangkan 80% peserta didik yang mengikuti ujian akhir Paket B dapat lulus ujian. (Departemen Pendidikan Nasional, 2004). Hal ini berarti semua peserta didik diharapkan dapat mengikuti ujian.

%L dihitung dari jumlah lulusan suatu program dibagi dengan jumlah peserta ujian program yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus yang digunakan adalah:

$$\%L = \frac{\text{Jumlah Lulusan}}{\text{Jumlah Peserta Didik}} \times 100$$

Catatan : Program Paket A, Paket B, Paket C, dan kesetaraan

Idealnya, %L adalah 100% berarti semua peserta didik yang mengikuti ujian lulus semuanya.

SB dihitung dari jumlah biaya seluruhnya untuk suatu program dibagi dengan jumlah peserta didik sesuai dengan program tersebut. Rumus yang digunakan adalah:

$$SB = \frac{\text{Jumlah biaya}}{\text{Jumlah peserta didik}}$$

Catatan : Program Paket A, Paket B, Paket C, dan kesetaraan

SB makin tinggi makin baik karena makin banyak biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan program Paket.

Untuk menentukan bahwa program kesetaraan tersebut sudah bermutu maka digunakan tujuh indikator mutu. Selain itu, oleh

karena masing-masing indikator memiliki pengaruh yang berbeda maka setiap indikator diberikan bobot berbeda. Untuk sumber daya manusia diberi bobot 0,5, peserta didik diberi bobot 0,3 sedangkan biaya diberi bobot 0,2 sehingga jumlah bobot sebesar 1. Indikator %PL diberi bobot paling tinggi yaitu 0,3, %, %PPG dan %PSP masing-masing diberi bobot 0,1, %PU dan %L diberi bobot masing-masing sebesar 0,15 sedangkan SB diberi bobot 0,2. SB dikonversi menjadi persentase dengan cara nilai SB dibagi dengan SB nasional. (Pusat Statistik Pendidikan, 2008a).

### Keberhasilan Program Kesetaraan

Keberhasilan program kesetaraan dinyatakan dalam tiga pilar kebijakan program pembangunan pendidikan nonformal. Oleh karena itu, keberhasilan setiap jenjang pendidikan juga akan diukur menggunakan ketiga pilar kebijakan program pembangunan pendidikan yang telah diuraikan sebelumnya. (Ida Kintamani, 2009a). Oleh karena pendayagunaan ini menggunakan dua pilar kebijakan maka kinerja program kesetaraan dinilai dari rata-rata dua pilar kebijakan

$$\text{Keberhasilan Program} = \frac{\text{Hasil Pemerataan} + \text{Hasil Mutu}}{2}$$

Catatan : Program Paket A, Paket B, Paket C, dan kesetaraan

Keberhasilan program pendidikan kesetaraan dapat digunakan sebagai standar nasional pencapaian sedangkan standar idealnya adalah 100%. Tabel 1 merupakan perhitungan keberhasilan program kesetaraan nasional yang hasilnya dibandingkan dengan ideal sebesar 100%. Untuk itu, keberhasilan nasional dijadikan sebagai standar nasional dan ideal merupakan standar ideal. Pada Tabel 1 ditunjukkan pencapaian nasional, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan program kesetaraan sebesar 40,99 sedangkan mutu pendidikan program kesetaraan sebesar 63,62 lebih baik daripada pemerataan sehingga keberhasilan pendidikan program kesetaraan secara nasional sebesar 52,30. Bila digunakan standar ideal sebesar 100% maka pencapaiannya sedikit lebih besar dari separuhnya. Dengan cara yang sama dapat diketahui keberhasilan program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Tabel 1. Keberhasilan Program Kesetaraan Nasional Tahun 2008

Program	Pemerataan		Mutu		Keberhasilan	
	Nasional	Ideal	Nasional	Ideal	Nasional	Ideal
Kesetaraan	40.99	100.00	63.62	100.00	52.30	100.00
Paket A	40.30	100.00	51.41	100.00	45.86	100.00
Paket B	42.24	100.00	62.88	100.00	52.56	100.00
Paket C	41.12	100.00	69.81	100.00	55.46	100.00

program pembangunan pendidikan. Rata-rata tersebut dihitung dari semua nilai "Jumlah" angka semua indikator setelah diberi bobot. Pemilihan kedua kelompok indikator dengan ke-13 jenis nilai indikator ini karena dianggap yang paling tepat mengukur keberhasilan program kesetaraan. (Pusat Statistik Pendidikan, 2008a). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program kesetaraan adalah gabungan dari pemerataan dan mutu.

Untuk mengukur keberhasilan program kesetaraan maka hasil indikator pemerataan ditambah dengan hasil indikator mutu kemudian dibagi angka 2. Rumus yang digunakan adalah:

### Hasil dan Bahasan

Untuk melaksanakan pendayagunaan program kesetaraan Provinsi Sulawesi Barat maka digunakan indikator program pembangunan pendidikan nonformal di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu, akan dijelaskan tentang empat hal yang menjadi tujuan, yaitu 1) kondisi pendidikan nonformal Provinsi Sulawesi Barat; 2) kondisi program kesetaraan Provinsi Sulawesi Barat; 3) hasil indikator pemerataan dan perluasan akses program kesetaraan Provinsi Sulawesi Barat, 4) hasil indikator mutu program kesetaraan Provinsi Sulawesi Barat; dan 5) keberhasilan program kesetaraan Provinsi Sulawesi Barat.



### Kondisi Pendidikan Nonformal Provinsi Sulawesi Barat

Pendataan Pendidikan Nonformal (PNF) yang dikelola dan dijaring oleh Pusat Statistik Pendidikan atau Depdiknas selama ini terdiri dari tujuh jenis, yaitu 1) Keaksaraan Fungsional (KF), 2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 3) Kesetaraan, 4) Kursus, 5) Kelompok Belajar Usaha (KBU), 6) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan 7) Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Tabel 2 memperlihatkan pada saat ini, Provinsi Sulawesi Barat memiliki program PNF yang lengkap sebanyak tujuh program. Dilihat dari lembaganya maka hanya terdapat lima jenis program, yaitu 104 lembaga PAUD yang terdiri dari 66 Kelompok Bermain (KB), 1 Taman Penitipan Anak (TPA), 3 POS PAUD, dan 34 Satuan PAUD Sejenis (SPS); 12 lembaga kursus, 9 lembaga PKBM, 8 lembaga KBU, dan 11 lembaga TBM. Jenis program PNF yang tidak memiliki lembaga ternyata memiliki kelompok belajar, yaitu sejumlah 448 untuk KF, 599 untuk kesetaraan yang terdiri dari 77 Paket A, 152 Paket B, dan 370 Paket C.

Dilihat dari peserta didik PNF, ternyata peserta didik Kesetaraan adalah yang terbesar (19.271 orang) diikuti PKBM (4.325 orang), KF (2.800 orang), PAUD (2.633 orang) dan yang terkecil adalah pengunjung TBM (104 orang). Dari tujuh jenis program PNF, ternyata yang melaksanakan ujian hanyalah KF, Kesetaraan,

kursus dan PKBM dengan jumlah peserta ujian masing-masing adalah 2.800 orang, 21.590 orang, 300 orang, dan 3.625 orang. Peserta yang lulus dari empat program tersebut, masing-masing adalah 2.800 orang, 13.421 orang, 240 orang, dan 3.560 orang. Tujuh jenis program PNF ini dikelola oleh penyelenggara dengan terbesar adalah program kesetaraan (239 orang) dan terkecil adalah program KBU (8 orang). Sejalan dengan itu, jumlah pendidik yang terbesar adalah 1.288 orang dan terkecil adalah program KBU sebesar 24 orang. Dilihat dari dana PNF, yang terbesar terdapat pada program kesetaraan sebesar Rp7.129.690 ribu, sedangkan yang terkecil terdapat di PKBM sebesar Rp90.000 ribu. Selain itu, diketahui juga penduduk usia PAUD adalah sebesar 233.583 orang dan penduduk usia kesetaraan sebesar 307.311 dengan rincian SD (164.952 orang), SMP (64.493 orang), dan SMA (77.886 orang).

### Kondisi Pendidikan Program Kesetaraan

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah kelompok belajar program kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 599 kelompok, terbesar adalah Paket C (370 kelompok) dan terkecil adalah Paket A (77 kelompok). Sebanyak 239 kelompok belajar program kesetaraan ini didanai dari APBN (39,90%) dan 360 kelompok berasal dari yayasan (60,10%). Jumlah peserta didik seluruhnya adalah

Tabel 2. Gambaran Umum Pendidikan Nonformal, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008

No.	Jenis Program	Lembaga	Kelompok Belajar	Peserta Didik	Peserta Ujian	Lulusan	Penyelenggara	Pendidik	Jumlah Dana (Ribuan Rp)	Penduduk Usia Sek
1	Keaksaraan Fungsional	0	448	2,800	2,800	2,800	130	130	982,800	
2	PAUD	104	0	2,633	0	0	106	215	842,000	233,583
	a. KB	66	0	1,650	0	0	66	132	300,000	
	b. TPA	1	0	85	0	0	3	9	120,000	
	c. POS PAUD	3	0	40	0	0	3	6	150,000	
	d. SPS	34	0	858	0	0	34	68	272,000	
3	Kesetaraan	0	599	19,271	21,590	13,421	239	1,288	7,129,690	307,331
	a. Paket A Setara SD	0	77	1,590	1,618	658	77	154	752,690	164,952
	b. Paket B Setara SMP	0	152	5,880	8,531	5,517	152	1,064	6,025,000	64,493
	c. Paket C Setara SMA	0	370	11,801	11,441	7,246	10	70	352,000	77,886
4	Kursus	12	0	300	300	240	12	36	264,000	
5	PKBM	9	0	4,325	3,625	3,560	173	519	90,000	
6	KBU	8	0	200	0	0	8	24	0	
7	TBM	11	0	104	0	0	11	0	185,000	
	Jumlah	144	1,047	29,633	28,315	20,021	679	2,212	9,493,490	

Catatan : Peserta didik pada TBM adalah pengunjung

Sumber : Kuesioner Profil Pendidikan Nonformal Provinsi Sulawesi Barat, 2008

19.271 yang terbesar Paket C (11.801 orang), sedangkan yang terkecil Paket A (1.590 orang). Sesuai dengan besarnya peserta didik di Paket C maka latar belakang peserta didik terbesar adalah lainnya sebesar 11.441 orang (59,37%). Dilihat dari kelompok usia maka yang terbesar usia >24 tahun sebesar 13.769 orang (71,54%) sedangkan yang terkecil usia 13-15 tahun sebesar 400 orang (2,08%).

Dari 19.271 peserta didik, yang mengikuti ujian lebih banyak sebesar 21.590 orang dirinci 12.212 adalah laki-laki (56,56%) dan 9.378 adalah perempuan (43,44%). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa laki-laki lebih berminat untuk mendapatkan ijazah sehingga mengikuti ujian daripada perempuan. Namun, dari mereka yang menjadi peserta ujian ternyata hanya 13.421 orang (62,16%) yang lulus dengan rincian lulusan laki-laki sebesar 7.920 orang (59,01%) juga lebih besar daripada perempuan sebesar 5.501 orang (40,99%).

Walaupun jumlah kelompok belajar Paket C adalah yang terbesar namun jumlah pendidik terbesar ternyata ada Paket B sebesar 1.064 orang (82,61%) sedangkan terkecil justru pada Paket C, yaitu sebesar 70 orang (5,43%). Tingkat pendidikan pendidik yang terbesar adalah lulusan Diploma sebesar 550 orang (42,70%) sedangkan terkecil adalah lulusan SM/MA sebesar 330 orang (25,62%). Pekerjaan pendidik terbesar adalah bukan guru sebesar 1.138 orang (88,35%). Sebagian besar pendidik tersebut sebesar 916 orang (71,12%) diketahui sudah mendapat pelatihan program kesetaraan. Dilihat dari usia, pendidik yang berusia 35-44 tahun adalah kelompok terbesar, sebanyak 819 orang (63,59%) dan terkecil pada usia 25-34 tahun sebesar 116 orang (9,01%). Masa kerja sebagian besar pendidik (55,75%) adalah 2 tahun dan terkecil (11,72%) dengan masa kerja 1 tahun.

Dari penyelenggara program kesetaraan sebesar 239 orang, 35,98% memiliki ijazah Diploma dan terkecil (31,80%) adalah lulusan S1 ke atas. Sebagian besar penyelenggara (95,82%) belum mendapat pelatihan program kesetaraan sebesar. Dilihat dari sumber dana diketahui sebesar Rp7.129.690 ribu yang kesemuanya bersumber dari APBN. Dana terbesar digunakan untuk proram Paket B sebesar Rp6.025.000 ribu

(84,51%) dan terkecil untuk Paket C sebesar Rp352.000,00 (4,94%).

### **Paket A**

Jumlah kelompok belajar Paket A di Provinsi Sulawesi Barat adalah 77 kelompok yang kesemuanya dibiayai dari APBN. Peserta didik berjumlah 1.590 orang yang terdiri dari 47,04% orang laki-laki dan 52,96% perempuan. Semua peserta didik berasal dari putus SD, berusia 19-24 tahun (39,94%) dan merupakan kelompok terbesar, diikuti usia 13-15 tahun (25,26%), dan terkecil pada usia >24 tahun (11,32%). Dari jumlah peserta didik tersebut, sebanyak 1.618 orang menjadi peserta ujian, terdiri dari 56,74% laki-laki dan 43,26% perempuan. Berdasarkan mereka yang mengikuti ujian ternyata hanya 658 orang (40,67%) yang lulus dengan rincian laki-laki sebesar 420 orang (63,83%) lebih besar daripada perempuan sebesar 238 orang (36,17%).

Pendidik pada program Paket A adalah 154 orang, dengan rincian 51,95% laki-laki dan 48,05% perempuan. Tingkat pendidikan pendidik sebagian besar merupakan lulusan SM/MA (40,91%) sedangkan sisanya lulusan Diploma dan S1 ke atas (59,09%). Pekerjaan pendidik terbesar adalah bukan guru (67,53%) dan semua pendidik belum pernah dilatih program Paket A. Kelompok usia terbesar pendidik pada usia 35-44 tahun (62,99%) dan terkecil pada usia 44-54 tahun (15,58%). Dilihat dari masa kerjanya, dengan terbesar pada masa kerja 2 tahun (48,70%), diikuti 1 tahun (33,77%) dan sisanya pada masa kerja 3 tahun (17,53%).

Penyelenggara program Paket A berjumlah 77 orang, dengan tingkat pendidikan SM/MA yang terbesar (45,45%) dan terkecil lulusan Diploma (25,97%). Semua penyelenggara belum pernah mendapat pelatihan program Paket A. Sumber dana penyelenggaraan program Paket A sebesar Rp752.690 ribu (10,56%) yang kesemuanya dari APBN.

### **Paket B**

Jumlah kelompok belajar Paket B di Provinsi Sulawesi Barat adalah 152 kelompok yang kesemuanya dibiayai dari APBN. Peserta didik berjumlah 5.880 orang yang terdiri dari 47,99% orang laki-laki dan 52,01% perempuan. Semua

Tabel 3. Gambaran Umum Program Kesetaraan, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008

No.	Variabel	Paket A	%	Paket B	%	Paket C	%	Jumlah	%
1	Kelompok Belajar	77	100.00	152	100.00	370	100.00	599	100.00
	- APBN	77	100.00	152	100.00	10	2.70	239	39.90
	- Peserta	0	0.00	0	0.00	360	97.30	360	60.10
2	Jumlah Peserta Didik								
	a. Jenis Kelamin	1,590	100.00	5,880	100.00	11,801	100.00	19,271	100.00
	- Laki-laki	748	47.04	2,822	47.99	6,617	56.07	10,187	52.86
	- Perempuan	842	52.96	3,058	52.01	5,184	43.93	9,084	47.14
	b. Latar Belakang	1,590	8.25	5,880	30.51	11,801	61.24	19,271	100.00
	- Putus SD	1,590	100.00					1,590	8.25
	- Lulus SD			5,880	100.00			5,880	30.51
	- Putus SMP			0	0.00			0	0.00
	- Lulus SMP					360	100.00	360	1.87
	- Putus SMA					0	0.00	0	0.00
	- Lainnya					11,441	100.00	11,441	59.37
	c. Kelompok Usia	1,590	100.00	5,880	100.00	11,801	100.00	19,271	100.00
	- 7-12 thn	0	0.00					0	0.00
	- 13-15 thn	400	25.16	0	0.00			400	2.08
	- 16-18 thn	375	23.58	1,745	29.68	0	0.00	2,120	11.00
	- 19-24 thn	635	39.94	2,200	37.41	147	1.25	2,982	15.47
	- > 24 thn	180	11.32	1,935	32.91	11,654	98.75	13,769	71.45
3	Jumlah Peserta Ujian								
	a. Jenis Kelamin	1,618	100.00	8,531	100.00	11,441	100.00	21,590	100.00
	- Laki-laki	918	56.74	4,900	57.44	6,394	55.89	12,212	56.56
4	- Perempuan	700	43.26	3,631	42.56	5,047	44.11	9,378	43.44
	Jumlah Lulusan								
	a. Jenis Kelamin	658	100.00	5,517	100.00	7,246	100.00	13,421	100.00
5	- Laki-laki	420	63.83	3,500	63.44	4,000	55.20	7,920	59.01
	- Perempuan	238	36.17	2,017	36.56	3,246	44.80	5,501	40.99
	Jumlah Pendidik								
6	a. Jenis Kelamin	154	100.00	1,064	100.00	70	100.00	1,288	100.00
	- Laki-laki	80	51.95	600	56.39	40	57.14	720	55.90
	- Perempuan	74	48.05	464	43.61	30	42.86	568	44.10
7	b. Pendidikan	154	100.00	1,064	100.00	70	100.00	1,288	100.00
	- SM/MA	63	40.91	267	25.09	0	0.00	330	25.62
	- Diploma	45	29.22	485	45.58	20	28.57	550	42.70
8	- S1/S2/S3	46	29.87	312	29.32	50	71.43	408	31.68
	c. Pekerjaan	154	100.00	1,064	100.00	70	100.00	1,288	100.00
	- Guru	50	32.47	100	9.40	0	0.00	150	11.65
9	- Bukan Guru	104	67.53	964	90.60	70	100.00	1,138	88.35
	d. Pelatihan	154	100.00	1,064	100.00	70	100.00	1,288	100.00
	- Sudah dilatih	0	0.00	916	86.09	0	0.00	916	71.12
10	- Belum dilatih	154	100.00	148	13.91	70	100.00	372	28.88
	e. Kelompok Usia	154	100.00	1,064	100.00	70	100.00	1,288	100.00
	- 25-34 th	33	21.43	76	7.14	7	10.00	116	9.01
11	- 35-44 th	97	62.99	673	63.25	49	70.00	819	63.59
	- 45-54 th	24	15.58	315	29.61	14	20.00	353	27.41
	f. Masa Kerja	154	11.96	1,064	82.61	70	5.43	1,288	100.00
12	- 1 th	52	33.77	88	8.27	11	15.71	151	11.72
	- 2 th	75	48.70	607	57.05	36	51.43	718	55.75
	- 3 th	27	17.53	369	34.68	23	32.86	419	32.53
13	Penyelenggara								
	a. Pendidikan	77	100.00	152	100.00	10	100.00	239	100.00
	- SM/MA	35	45.45	42	27.63	0	0.00	77	32.22
	- Diploma	20	25.97	63	41.45	3	30.00	86	35.98
	- S1/S2/S3	22	28.57	47	30.92	7	70.00	76	31.80
	b. Pelatihan	77	100.00	152	100.00	10	100.00	239	100.00
	- Sudah dilatih	0	0.00	10	6.58	0	0.00	10	4.18
	- Belum dilatih	77	100.00	142	93.42	10	100.00	229	95.82
	Jumlah Dana	752,690	10.56	6,025,000	84.51	352,000	4.94	7,129,690	100.00

Sumber: Kuesioner Profil Pendidikan Nonformal Provinsi Sulawesi Barat, 2008.

peserta didik berasal dari lulusan SD, berusia 19-24 tahun (37,41%) dan merupakan kelompok terbesar, diikuti usia >24 tahun (32,91%), dan terkecil pada usia 16-18 tahun (29,68%). Dari jumlah peserta didik tersebut, sebanyak 8.531 orang menjadi peserta ujian, terdiri dari 57,44% laki-laki dan 42,56% perempuan. Berdasarkan mereka yang mengikuti ujian ternyata hanya

5.517 orang (64,67%) yang lulus dengan rincian laki-laki sebesar 3.500 orang (63,44%) lebih besar daripada perempuan sebesar 2.017 orang (36,56%).

Pendidik pada program Paket B adalah 1.064 orang, dengan rincian 58,39% laki-laki dan 41,61% perempuan. Tingkat pendidikan pendidik sebagian besar merupakan lulusan Diploma 45,58%

sedangkan sisanya lulusan SM dan S1 ke atas (54,42%). Pekerjaan pendidik terbesar adalah bukan guru sebesar 90,60% dan sebagian besar (86,09%) pendidik belum pernah dilatih program Paket B. Kelompok usia terbesar pendidik pada usia 35-44 tahun (63,25%) dan terkecil pada usia 25-34 tahun (7,14%). Dilihat dari masa kerjanya, dengan terbesar pada masa kerja 2 tahun (57,05%), diikuti 3 tahun (34,68%) dan sisanya pada masa kerja 1 tahun (8,27%).

Penyelenggara program Paket B berjumlah 152 orang, dengan tingkat pendidikan Diploma yang terbesar (41,45%) dan terkecil lulusan SM/MA (27,63%). Sebagian besar (93,42%) penyelenggara belum pernah mendapat pelatihan program Paket B. Sumber dana penyelenggaraan program Paket B sebesar Rp6.025.000 ribu (84,51%) yang semuanya dari APBN.

### Paket C

Jumlah kelompok belajar Paket C di Provinsi Sulawesi Barat adalah 370 kelompok yang sebagian besar (97,30%) dibiayai dari peserta dan sisanya (2,70%) dari APBN. Peserta didik berjumlah 11.801 orang yang terdiri dari 56,07% orang laki-laki dan 43,93% perempuan. Sebagian besar (96,95%) peserta didik berasal dari lainnya, berusia >24 tahun (98,75%) dan merupakan kelompok terbesar dan usia 19-24 tahun (1,25%). Dari jumlah peserta didik tersebut, sebanyak 11.441 orang (96,95%) menjadi peserta ujian, terdiri dari 55,89% laki-laki dan 44,11% perempuan. Berdasarkan mereka yang mengikuti ujian ternyata hanya 7.246 orang (63,33%) yang lulus dengan rincian laki-laki sebesar 4.000 orang (55,20%) lebih besar daripada perempuan sebesar 3.246 orang (44,80%).

Pendidik pada program Paket C adalah 70 orang, dengan rincian 57,14% laki-laki dan 42,86%

perempuan. Tingkat pendidikan pendidik sebagian besar merupakan lulusan S1 ke atas (71,43%) sedangkan sisanya lulusan Diploma (28,57%). Pekerjaan pendidik kesemuanya bukan guru dan belum pernah dilatih program Paket C. Kelompok usia terbesar pendidik pada usia 35-44 tahun (70,00%) dan terkecil pada usia 25-34 tahun (10,00%). Dilihat dari masa kerjanya, dengan terbesar pada masa kerja 2 tahun (51,43%), diikuti 3 tahun (32,86%) dan sisanya pada masa kerja 1 tahun (15,71%).

Penyelenggara program Paket C berjumlah 10 orang, dengan tingkat pendidikan S1 ke atas yang terbesar (70,00%) dan terkecil lulusan Diploma (30,00%). Semua penyelenggara belum pernah mendapat pelatihan program Paket C. Sumber dana penyelenggaraan program Paket C sebesar Rp352.000 ribu (4,94%) yang semuanya dari APBN.

### Hasil Indikator Program Kesetaraan

Berdasarkan Tabel 4, akses pendidikan program kesetaraan Provinsi Sulawesi Barat yang ditunjukkan melalui APK sebesar 6,27%. Hal ini berarti program kesetaraan hanya menyumbang 6,27% pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk program Paket A sebesar 0,96% sangat kecil jika dibandingkan dengan Paket B sebesar 9,12% dan Paket C sebesar 15,15%. Indikator R-PD/KB program kesetaraan sebesar 32 dan terkecil adalah Paket A sebesar 21 dan terbesar Paket B sebesar 39 sedangkan Paket C sebesar 32. Indikator R-PD/P program kesetaraan sebesar 15 dan terkecil adalah Paket B sebesar 6 dan terbesar Paket C sebesar 169 sedangkan Paket A sebesar 10.

Pemerataan pendidikan program kesetaraan Provinsi Sulawesi Barat ditunjukkan dari indikator %PDJK di mana laki-laki sebesar 52,86% lebih

Tabel 4. Indikator Pemerataan Program Kesetaraan, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008

Program	Akses Pendidikan			Pemerataan Pendidikan			
	APK	R-PD/KB	R-PD/P	%PDJKI	%PDKLp	PG	RG
Kesetaraan	6.27	32.17	14.96	52.86	47.14	5.72	0.89
Paket A	0.96	20.65	10.32	47.04	52.96	-5.91	1.13
Paket B	9.12	38.68	5.53	47.99	52.01	-4.01	1.08
Paket C	15.15	31.89	168.59	56.07	43.93	12.14	0.78

besar daripada perempuan sebesar 47,14%. Hal ini menunjukkan terjadi perbedaan gender sebesar 5,72% dan ketidakseimbangan gender dengan rasio gender sebesar 0,89. Hal ini berarti partisipasi peserta didik program kesetaraan belum seimbang antara laki-laki dan perempuan karena nilainya tidak sama dengan 1 dan laki-laki lebih baik partisipasinya daripada perempuan. (Pusat Statistik Pendidikan, 2008b). Kondisi pemerataan pendidikan pada Paket B adalah yang terbaik karena memiliki PG terkecil sebesar -4,01%. Berarti peserta didik perempuan lebih besar daripada laki-laki dengan RG sebesar 1,08. Namun belum terjadi keseimbangan gender karena jauh dari 1. Paket C yang terburuk karena memiliki PG terbesar sebesar 12,14% yang berarti laki-laki lebih besar daripada perempuan dengan RG sebesar 0,78 sangat jauh dari seimbang yang seharusnya sebesar 1. Paket A memiliki PG sebesar -5,91% yang berarti perempuan lebih besar daripada laki-laki dengan RG sebesar 1,13 masih jauh dari seimbang yang seharusnya sebesar 1.

Berdasarkan Tabel 5 maka indikator %PL program kesetaraan menunjukkan pendidik yang layak mengajar di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 31,68%. Pendidik terbesar adalah pendidik di Paket C (71,43%) dan terkecil adalah pendidik Paket B (29,32%) sedangkan Paket A sebesar 29,87%. Indikator %PTG yaitu pendidik program kesetaraan yang berasal dari guru diketahui sebesar 11,65%. Pendidik terbesar dari pendidik Paket A (32,47%) dan Paket B (9,40%) sedangkan pendidik Paket C tak ada yang berasal dari guru. Indikator %PSP atau pendidik program kesetaraan yang telah mendapatkan pelatihan program kesetaraan adalah sebesar 71,12%. Namun, pendidik Paket A dan Paket C sama sekali belum mendapatkan pelatihan, sedangkan Paket B yang memperoleh pendidikan adalah sebesar 86,09%.

Indikator %PL atau penyelenggara program kesetaraan yang berijazah S1 dan lebih tinggi adalah sebesar 64,02%. %PL terbesar adalah penyelenggara Paket A (74,03%) dan terkecil tutor Paket B (58,55%) sedangkan Paket C (70,00%). Dilihat dari peserta didik maka indikator %PU program kesetaraan yang menunjukkan besarnya peserta didik yang menjadi peserta ujian sebesar 112,03% yang berarti lebih besar dari peserta didik di program kesetaraan. Ternyata pada Paket A dan Paket B, indikator %PU sudah lebih besar dari 100% sedangkan Paket C lebih rendah sebesar 96,95%. Indikator %L program kesetaraan yang menunjukkan besarnya lulusan mencapai 62,16% terbesar adalah lulusan Paket B (64,67%) dan terkecil adalah Paket A (40,67%) sedangkan Paket C sebesar 63,33%. Dilihat dari biaya maka SB program kesetaraan adalah sebesar Rp369.970,00, SB Paket B yang terbesar (Rp1.024.660,00) dan terkecil adalah Paket C (Rp29.828,00), sedangkan Paket A adalah sebesar Rp463.390,00.

### Keberhasilan Program Kesetaraan

Indikator pemerataan dan perluasan akses pendidikan digunakan untuk menilai pemerataan pendidikan program kesetaraan yang dapat dicapai, indikator mutu digunakan untuk menilai mutu pendidikan program kesetaraan yang dapat dicapai. Gabungan dari kedua indikator tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan program pembangunan pendidikan khusus program kesetaraan.

Indikator yang diambil untuk menghitung pemerataan hanya tiga jenis, yaitu APK, R-PD/KB, dan R-PD/P sedangkan indikator untuk menghitung mutu ada tujuh jenis, yaitu %PL, %PPG, %PSP, %PS1, %PU, %L, dan SB. Oleh karena indikator pemerataan dan mutu dalam bentuk persentase dan rasio maka indikator

Tabel 5. Indikator Mutu Program Kesetaraan, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008

Program	%PL	%PPG	%PSP	%PS1	%PU	%L	SB
Kesetaraan	31.68	11.65	71.12	64.02	112.03	62.16	369,970
Paket A	29.87	32.47	0.00	74.03	101.76	40.67	473,390
Paket B	29.32	9.40	86.09	58.55	145.09	64.67	1,024,660
Paket C	71.43	0.00	0.00	70.00	96.95	63.33	29,828

dalam bentuk rasio dikonversi dalam bentuk persentase. Untuk jelasnya, terdapat tiga indikator yang harus mengalami konversi, yaitu R-PD/KB, R-PD/P dan SB. Dalam menentukan konversi maka digunakan nilai nasional sehingga nilai yang kurang dari nasional menghasilkan nilai kurang dari 100%, sebaliknya yang lebih dari nilai nasional dinyatakan > 100%.

Nilai pendidikan merata merupakan penjumlahan dari tiga jenis indikator pemerataan setelah konversi dan diberikan bobot. Nilai pendidikan bermutu adalah penjumlahan dari tujuh indikator mutu setelah diberikan bobot. Nilai keberhasilan program kesetaraan adalah penjumlahan nilai pendidikan merata dan pendidikan bermutu kemudian dibagi 2. Nilai maksimal untuk masing-masing indikator dan keberhasilan program kesetaraan adalah 100.

Tabel 6 menunjukkan pemerataan program kesetaraan setelah dilakukan konversi dan diberikan bobot sehingga nilainya menjadi 36,78 dengan rincian tertinggi adalah Paket B sebesar 50,53 dan terkecil adalah Paket C sebesar 38,06 sedangkan Paket A sebesar 38,14. Jika digunakan standar ideal maka pemerataan program kesetaraan mencapai 36,78% masih jauh dari 100% jika dibandingkan dengan standar nasional (40,99) diketahui telah mencapai 89,74% sehingga hanya 10,26% yang perlu dituntaskan pemerataannya.

Untuk Paket A dengan menggunakan standar ideal, diketahui bahwa pemerataan Paket A adalah sebesar 38,14%, jika digunakan standar nasional maka pemerataan Paket A mencapai 94,64% sehingga hanya 5,36% perlu dituntaskan pemerataannya. Untuk Paket B dengan menggunakan standar ideal, pemerataan Paket B adalah sebesar 50,53% jika digunakan standar nasional maka pemerataan Paket B mencapai 119,63% lebih baik dari nasional. Oleh karena itu, Paket B harus diarahkan menuju standar ideal. Untuk Paket C dengan menggunakan standar ideal, pemerataan Paket C adalah sebesar 38,06% jika digunakan standar nasional maka pemerataan Paket C adalah sebesar 92,57% sehingga hanya 7,43% yang perlu dituntaskan pemerataannya.

Tabel 7 menunjukkan mutu program kesetaraan setelah dilakukan konversi dan diberikan bobot sehingga nilainya menjadi 54,70 dengan rincian tertinggi adalah Paket B sebesar 73,23 dan terkecil adalah Paket C sebesar 45,83 sedangkan Paket A sebesar 56,92. Bila digunakan standar ideal maka mutu program kesetaraan mencapai 36,78% masih jauh dari 100% sedangkan jika dibandingkan dengan standar nasional (63,62) mencapai 85,98% sehingga hanya 14,02% yang perlu dituntaskan mutunya.

Untuk program Paket A dengan menggunakan standar ideal, mutu Paket A adalah sebesar

Tabel 6. Pemerataan Program Kesetaraan, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008

Program	APK	R-PD/KB		R-PD/P		Jumlah	Nasional	%
Bobot	0.6	Konversi	0.2	Konversi	0.2	1		
Kesetaraan	3.76	128.90	25.78	36.20	7.24	36.78	40.99	89.74
Paket A	0.58	96.76	19.35	91.06	18.21	38.14	40.30	94.64
Paket B	5.47	139.55	27.91	85.78	17.16	50.53	42.24	119.63
Paket C	9.09	141.46	28.29	3.39	0.68	38.06	41.12	92.57

Tabel 7. Mutu Program Kesetaraan, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008

Program	%PL	%PPG	%PSP	%PS1	%PU	%L	SB	Jumlah	Nasional	%
Bobot	0.2	0.1	0.1	0.1	0.15	0.15	Konversi	0.2	1	
Kesetaraan	6.34	1.16	7.11	6.40	16.81	9.32	37.81	7.56	54.70	63.62
Paket A	5.97	3.25	0.00	7.40	15.26	6.10	94.68	18.94	56.92	51.41
Paket B	5.86	0.94	8.61	5.86	21.76	9.70	102.47	20.49	73.23	62.88
Paket C	14.29	0.00	0.00	7.00	14.54	9.50	2.49	0.50	45.83	69.81

56,92%, sedangkan dengan standar nasional (51,41) maka mutu Paket A sebesar 110,72% lebih baik dari nasional. Oleh karena itu, Paket A harus diarahkan menuju standar ideal. Sama dengan Paket A, untuk Paket B dan digunakan standar ideal, mutu Paket B sebesar 73,23% sedangkan jika digunakan standar nasional (62,88) maka mutu Paket B sebesar 116,45% lebih baik dari nasional. Oleh karena itu, Paket B juga harus diarahkan menuju standar ideal. Untuk Paket C dan digunakan standar ideal, mutu Paket C sebesar 45,83% sedangkan jika digunakan standar nasional (69,81) maka mutu Paket C sebesar 65,65% sehingga masih sebesar 34,35% yang perlu dituntaskan mutunya.

Sulawesi Barat tahun 2008 perlu dipahami terlebih keadaan pendidikan nonformal, keadaan pendidikan program kesetaraan dengan menggunakan dua pilar kebijakan, yaitu indikator pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan indikator mutu pendidikan. Berdasarkan kedua indikator tersebut maka dapat dihitung keberhasilan program kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat.

Provinsi Sulawesi Barat memiliki ketujuh program pendidikan nonformal dan yang terbesar adalah program kesetaraan. Program kesetaraan disebut terbesar karena semua variabel pendidikan nonformal, yaitu kelompok belajar, peserta didik, peserta ujian, lulusan, penyeleng-

Tabel 8. Keberhasilan Program Kesetaraan, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008

Program	Pemerataan			Mutu			Keberhasilan		
	Sulbar	Nasional	%	Sulbar	Nasional	%	Sulbar	Nasional	%
Kesetaraan	36.78	40.99	89.74	54.70	63.62	85.98	45.74	52.30	87.46
Paket A	38.14	40.30	94.64	56.92	51.41	110.72	47.53	45.86	103.65
Paket B	50.53	42.24	119.63	73.23	62.88	116.45	61.88	52.56	117.72
Paket C	38.06	41.12	92.57	45.83	69.81	65.65	41.94	55.46	75.62

Tabel 8 menunjukkan keberhasilan program kesetaraan di Provinsi Sulawesi Selatan yang dihitung dari nilai pemerataan dan nilai mutu. Nilai pemerataan berdasarkan tiga jenis indikator tersebut sebesar 36,78 sedangkan nilai mutu berdasarkan tujuh jenis indikator sebesar 54,70 sehingga keberhasilan program mencapai 45,74. Dengan menggunakan standar ideal sebesar 100%, keberhasilan program kesetaraan yang diperoleh sebesar 45,74% sehingga masih ada 54,25% yang perlu dituntaskan sedangkan dengan menggunakan standar nasional (52,30) maka keberhasilan program kesetaraan sebesar 87,46% sehingga hanya ada 12,54% yang harus dituntaskan keberhasilannya.

Bila dirinci menurut jenis program kesetaraan maka keberhasilan program Paket A sebesar 47,53. Dengan menggunakan standar ideal maka keberhasilan program Paket A hanya mencapai 47,53% namun bila digunakan standar nasional (45,86) maka keberhasilan program Paket A sudah lebih baik daripada nasional dengan nilai 103,65%. Dengan demikian, untuk program Paket A supaya diarahkan pada standar ideal. Keberhasilan program Paket B dan berdasarkan

standar ideal sebesar 61,88 yang paling baik jika dibandingkan dengan program kesetaraan lainnya. Hal ini berarti keberhasilan program Paket B telah mencapai 61,88% namun bila digunakan standar nasional (52,56) maka keberhasilan program Paket B sudah lebih baik daripada nasional dengan nilai 117,72%. Dengan demikian, untuk program Paket B supaya diarahkan pada standar ideal. Keberhasilan program Paket C dan berdasarkan standar ideal sebesar 41,94 yang paling buruk jika dibandingkan dengan program kesetaraan lainnya. Hal ini berarti keberhasilan program Paket C mencapai 41,94% namun bila digunakan standar nasional (55,46) maka keberhasilan program Paket C lebih buruk daripada nasional dengan nilai 75,62%. Dengan demikian, masih harus dituntaskan sebesar 24,38% agar program kesetaraan berhasil.

## Simpulan dan Saran

### Simpulan

Berdasarkan hasil dan bahasan maka dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pendayagunaan terhadap program kesetaraan Provinsi

gara, pendidik, dan biaya yang digunakan paling besar jika dibandingkan dengan program pendidikan nonformal lainnya. Program kesetaraan ini banyak dikelola oleh peserta atau masyarakat sendiri (60,10%) dengan peserta didik sebesar 19.271 orang, pendidik sebesar 1.288 orang, penyelenggara sebesar 239 orang, dan dana sebesar Rp7.129.690 ribu.

Berdasarkan standar ideal, pemerataan program kesetaraan Provinsi Sulawesi Barat mencapai 36,78% sehingga masih 63,22% yang harus ditangani sehingga tuntas. Namun, bila digunakan standar nasional maka pemerataan telah tercapai 89,74% sehingga yang harus dituntaskan hanya 10,26%.

Berdasarkan standar ideal, mutu pendidikan tinggi di Provinsi Sulawesi Barat ternyata masih menjadi masalah pokok dalam program pembangunan pendidikan. Kondisi ini nampak dari hasil pendayagunaan hanya sebesar 54,70% sehingga masih 46,30% yang harus ditangani sehingga tuntas. Namun, bila digunakan standar nasional maka mutu Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai 74,98% sehingga hanya 23,02% yang perlu ditangani.

Dengan sangat rendahnya nilai pemerataan dan mutu pendidikan program kesetaraan maka bila digunakan standar ideal keberhasilan program kesetaraan Provinsi Sulawesi Barat juga menjadi turun dengan pencapaian 45,74% sehingga masih 54,26% yang harus ditangani agar menjadi tuntas. Namun, bila digunakan standar nasional maka keberhasilan program kesetaraan telah

tercapai 87,46% sehingga hanya 12,54% yang perlu ditingkatkan.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maka agar program kesetaraan di Provinsi Sulawesi Barat meningkat baik dari segi pemerataan maupun mutu pendidikan tinggi maka beberapa hal perlu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat khususnya Dinas Pendidikan Sulawesi Barat, yaitu 1) partisipasi peserta didik program kesetaraan terutama Paket A dan Paket B harus ditingkatkan sehingga APK dapat meningkat, 2) partisipasi peserta didik perempuan di Paket C agar ditingkatkan 3) partisipasi peserta didik agar ditingkatkan sehingga R-PD/KB juga akan meningkat, 3) rekrutmen pendidik harus ditingkatkan baik dari segi jumlah terutama Paket C maupun kualitas ijazah sehingga %PL meningkat dan mendekati kondisi nasional terutama pendidik Paket A dan Paket B, 4) rekrutmen pendidik sebaiknya berasal dari guru karena sudah memahami bagaimana mengajar, 5) rekrutmen pendidik sebaiknya diikuti dengan pelatihan tentang program kesetaraan sehingga hasilnya maksimal terutama untuk Paket A dan Paket C, 6) perlu tambahan belajar bagi peserta didik Paket A sehingga lulusan akan meningkat, dan 7) biaya terutama untuk Paket C perlu ditingkatkan karena terlalu kecil (Rp 29.828,00) dibandingkan dengan Paket A (Rp473.390,00) dan B (Rp1.024.660,00). Hasil kajian ini dapat dijadikan model untuk diterapkan pada provinsi lainnya.

### **Pustaka Acuan**

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2004. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang. Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Pembangunan Pendidikan Nasional 2005—2008. Jakarta.  
<http://bukhari.or.id/home/Stara/index.htm> diakses pada tanggal 10 Februari 2010.

[http://web.banpnf.or.id/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=110&Itemid=471](http://web.banpnf.or.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=110&Itemid=471) diakses pada tanggal 12 Februari 2010

Ida Kintamani. 2007. Pendataan Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Ditjen Dikdasmen.



- Ida Kintamani. 2009a. Analisis profil Pendidikan Kabupaten Buleleng, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Januari 2009, Tahun ke-15, Nomor 1.
- Ida Kintamani. 2009b. Pendayagunaan Data Pendidikan. Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan.
- Pusat Statistik Pendidikan. 2008a. Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan 2006/2007. Jakarta: Depdiknas.
- Pusat Statistik Pendidikan. 2008b. Statistik dan Indikator Pendidikan Berwawasan Gender 2006/2007. Jakarta: Depdiknas.
- Pusat Statistik Pendidikan. 2008c. Pengembangan Model Profil Pendidikan Nonformal. Jakarta: Depdiknas
- Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional, Nomor: 107/MPN/MS/2006 Tentang Eligibilitas Program Kesetaraan.